

## Faktor Morality Dan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pencegahan Fraud Dana Desa

Meifida Ilyas<sup>1</sup>, Haryono Umar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Satya Negara Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Akuntansi, Perbanas Institusi Indonesia

Email: meifidacantique@yahoo.com, Flamboyan24@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, whistleblowing system, dan moralitas aparatur desa terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Dana desa dapat berfungsi optimal, digunakan secara tepat sasaran, guna membangun desa, sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Agar penyaluran Dana Desa benar-benar efektif dan berdampak signifikan pada desa terutama dalam percepatan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, serta mengurangi kemiskinan desa. Penelitian ini dilakukan pada 40 kalurahan di lima Kecamatan yang berada di Sumatera Selatan dengan sampel penelitian yang digunakan berjumlah 200 responden. Teknik penarikan sampel yang digunakan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah kuesioner yang disebar kepada responden secara langsung. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS 28. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, whistleblowing system, dan moralitas aparatur kalurahan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci:** *Kompetensi; Sistem Informasi Akuntansi Whistleblowing; Moralitas; Fraud.*

### Abstract

*This study aims to determine the effect of human resource competence, accounting information systems, whistleblowing systems, and village apparatus morality on fraud prevention in village financial management. Village funds can function optimally, used on target, in order to develop villages, according to the needs and potential of each. So that the distribution of Village Funds is truly effective and has a significant impact on villages, especially in accelerating a productive economy, driving industry in rural areas, and reducing village poverty. This research was conducted in 40 sub-districts in five sub-districts in South Sumatra with a sample of 200 respondents. The sampling*

Page 877 of 902

Lisensi	: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Published by	: Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv
Url	: <a href="http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/277">http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/277</a>

*technique used was purposive sampling technique. The type of data used is a questionnaire distributed to respondents directly. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis using IBM SPSS 28. The results showed that human resource competence, internal control systems, whistleblowing systems, and village apparatus morality had a positive effect on fraud prevention in village financial management.*

**Keywords:** *Competence; Whistleblowing Accounting Information System; Morality; Fraud*

## **Pendahuluan**

Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2023 serta penjelasannya mengacu terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022, membangun infrastruktur berupa jalan desa (Umar,2018). Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur sertamengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia( Umar,et,all, 2020). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan peningkatan dengan pembangunan di kalurahan dengan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah kalurahan untuk membagi alokasi dana desa dan pemberian alokasi dana desa pada setiap daerah berbeda-beda tergantung beberapa aspek yaitu jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah kalurahan dan tingkat kesulitan di kalurahan kalurahan dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung-jawaban oleh Lurah, Carik, Danarta dan Kepala Seksi (Njonjie et al., 2019; Laksmi &Sujana, 2019; Junia et al., 2016).

Alokasi dana desa yang meningkat dari tahun ke tahun tidak berarti bahwa dana desa pada kenyataannya bisa terserap sepenuhnya(Julianto & Dewi, 2019). Dana Desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa yang berasal dariAnggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerataanbangunan dan peningkatan ekonomi desa (Jayanti & Suardana, 2019; Islamiyah et al., 2020). Pemberian dana desa dibagi menjadi tiga tahapan dan pemberian dana dilakukan melalui transfer dari rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan ke rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota (Wijayanti & Hanafi, 2018). Dana desa diharapkan dapat membentuk kalurahan yang mandiri

dan berintegritas dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah (Njonjie et al., 2019; Umar, et,all, 2019). Dalam pengelolaan keuangan desa harus adil dan bermanfaat pada masyarakat serta wajib dikelola secara patuh, taat terhadap peraturan undang – undang, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan KeuanganDesa (Atmadja & Saputra, 2017).

Pemerintah kalurahan mempunyaikewajiban mengelola keuangan di kalurahanyang merupakan hak dan kewajiban kalurahan yang dapat diukur dengan uangatau barang yang saling terhubung dengan kegiatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban kalurahan (Njonjie et al., 2019). Pengelolaan keuangan di kalurahandilakukan selama satu tahun anggaran yaitu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember (Atmadja & Saputra, 2017). Danayang diberikan pemerintah kepada desacukup banyak sehingga aparat kalurahan ditekan untuk cermat dalam mengelola keuangan tersebut agar visi dan misi bersamadapat tercapai (Umar, 2011; Purnamawati & Adnyani, 2019). Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan cukup besar untukdana desa memiliki peluang terjadinya *fraud*oleh pihak tidak bertanggung jawab yang sudah dipercaya masyarakat (Jayanti & Suardana, 2019). Kasus kecurangan penyalahgunaan dana yang diberikan desamasih meningkat setiap tahunnya salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan aparat pemerintah (Handi et al., 2021).

Umar, (2012) meyakini bahwa kecurangan (*Fraud*) merupakan kesalahan atau pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja oleh sekelompok atau perorangan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain (Laksmi & Sujana, 2019). Kecurangan (*Fraud*) dapat disebabkan oleh kompetensi aparat kalurahan yang kurang, pengendalian internal dan *whistleblowing system* yang masih lemah, serta moralitasyang rendah sehingga berimbas pada kesalahan dalam menganggarkan APBDes dan Anggaran

Rumah Tangga (ART), serta pencatatan aset sehingga perlu dilakukan dan diminimalisir dengan pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa (Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 2019).

*Fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953) merupakan gagasan yang meneliti tentang penyebab kecurangan (*fraud*) terjadi berdasarkan tiga kondisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu: a. Tekanan (*Pressure*), setiap individu pelaku kecurangan mempunyai tekanan yang sangat kuat di dalam dirinya sendiri sehingga dia mampu mengambil keputusan untuk melakukan kecurangan. B. Peluang (*Opportunity*), seorang karyawan memiliki tekanan yang kuat untuk melakukan kecurangan dan kecurangan dapat terjadi karena terdapat peluang untuk melakukan kecurangan. C. Pembeneran (*Rationalization*), kecurangan yang dilakukan karyawan akan dikenakan sanksi yang berlaku dan pada saat tindakan kecurangan terdeteksi, pelaku kecurangan akan memberikan alasan-alasan pembeneran perbuatannya (Umar, et, all, 2019).

Pemahaman publik sangat dibutuhkan untuk memantau atau mengawasi tanggung jawab aparatur desa dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kepada masyarakat setiap kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa (Utami & Ibrahim, 2019). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pemakaian dana desa harus diimbangi dengan pencegahan agar dapat meminimalisir tindakan penyelewengan pada pengelolaan keuangan desa karena kecurangan akuntansi keuangan publik lebih rentan terjadi daripada di lingkungan perusahaan (Laksmi & Sujana, 2019; Junia et al., 2016). Kontrol penggunaan dana desa yang dianggarkan dapat melalui 43iker43l43, yaitu: 43iker43l vertikal oleh aparatur desa sampai pemerintah pusat dan 43iker43l horizontal oleh masyarakat (Wulandari & Widodo, 2020). Pencegahan kecurangan (*Fraud*) yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir penyebab terjadinya kecurangan dengan adanya kompetensi aparatur kalurahan, adanya sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* yang baik, serta meningkatkan penanaman moralitas individu (Islamiyah et al., 2020; Inawati & Sabila, 2021).

Laporan keuangan wajib dikerjakan oleh karyawan yang mempunyai keahlian akuntansi dan teknik informasi dengan tujuan memberikan *output* informasi yang bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan sehingga meminimalisir atau menghindari pada kesalahan dalam

mencatat dan tindak penyelewengan pada akuntansi yang disebut kecurangan (*fraud*) (Junia et al., 2016). Kelalaian dalam akuntansi pada sektor publik dapat memicu terjadinya data dan informasi laporan keuangan yang dikeluarkan menjadi tidak rasional dan menyimpangkan pihak yang berkepentingan untuk penilaian kemampuan sampai dalam mengambil keputusan sehingga dibutuhkan cara untuk meminimalisir tindakan penyelewengan pada pemerintahan atau swasta (Dennyningrat & Suputra, 2018; Dewi et al., 2017). Kecurangan dalam akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu: penyelewengan aktiva, penipuan, penggelapan dana (ACFE, 2016).

Kompetensi sumber daya manusia merupakan keahlian dasar dan kapasitas kinerja individu untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Kompetensi sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan tugas suatu organisasi, karena keberhasilan ditentukan oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di organisasi tersebut serta pada organisasi sektor publik individu lebih difokuskan untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga kinerja dan tanggung jawab organisasi tetap terjaga dan dipercaya oleh masyarakat (Zubaidi et al., 2019). Kompetensi dibutuhkan organisasi untuk menghadapi permasalahan dan perubahan yang bisa terjadi di masa depan sehingga semakin berkemampuannya aparat pemerintah maka tingkat pencegahan *fraud* semakin tinggi (Armelia & Wahyuni, 2020). Kompetensi sumber daya individu yang mempunyai kualitas sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengelola keuangan desa (Laksmi & Sujana, 2019).

Individu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang memuaskan akan lebih mudah untuk mengetahui atau melacak tindakan *fraud* yang terjadi disekitarnya karena mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi yang membuat dirinya lebih peka dari pelaku yang melakukan tindakan kecurangan (Jayanti & Suardana, 2019). Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur kompetensi sumber daya manusia berhubungan dengan kemampuan seseorang meliputi

pengetahuan, pengalaman, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang berlaku (Laksmi & Sujana, 2019). Kompetensi dapat ditingkatkan dengan berlatih, belajar, menambah pengalaman dan pengetahuan (Islamiyah et al., 2020). Kompetensi sumber daya yang berkualitas dan baik akan menghasilkan laporan keuangan organisasi yang berkualitas pula sehingga dapat mencegah tindakan kecurangan/*fraud* (Herttai, et,all, 2023; Jayanti & Suardana,2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi & Sujana (2019) dan Islamiyah et al. (2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu semakin tinggikualitas kompetensi sumber daya manusiamaka semakin tinggi pula tingkat pencegahan*fraud* pada pengelolaan keuangan desa (Hertati, et,all2020; Atmadja & Saputra, 2017; Arifin,,et,all, 2023).

Sistem informasi akuntansi merupakan kebijakan atau peraturan yang dijalankan pada suatu organisasi yang berfungsi untuk memberikan keyakinan terhadap keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan, patuh terhadap hukum yang berlaku (Laksmi & Sujana, 2019; Yendrawati, 2013). Sistem Pengendalian internal yang baik akan membuat suatu instansi bisa melaksanakan aktivitas sesuai visi dan misi organisasi (Dennyningrat &Suputra, 2018). Tindakan kecurangan/*fraud* bisa dicegah atau diminimalisir dengan mengawasi Sistem informasi akuntansi sehingga meminimalisir kesempatan individu yang bermaksud melakukan kecurangan(Laksmi & Sujana, 2019; Armelia & Wahyuni, 2020). Pengendalian internal yang efektif juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* (Astuti et al., 2017). Semakin kuat Sistem informasi akuntansi yang ada pada pemerintah kalurahan maka semakin kecilpeluang untuk melakukan kecurangan pada pemerintahan kalurahan (Herttai, et,all, 2023; Njonjie et al., 2019). Suatu organisasi wajib mempunyaidan merancang Sistem informasi akuntansi yang efektif pada setiap kegiatan yangdilakukan oleh pegawai dalam organisasi tersebut agar dapat mengawasi dengan ketat. Pelaksanaan pengendalian akuntansi berdasar pada penguatan Sistem informasi akuntansi yang sudah ada dan dilaksanakan olehseluruh lapisan pegawai pada organisasi tersebut mulai dari peraturan – peraturan,pendirian organisasi, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, pegawai, dan prosedurdalam pelaksanaan kegiatan (Zubaidi et al.,

2019; Usmar & Nurfadillah, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi & Sujana (2019) dan Islamiyah et al. (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan di Kalurahan. Semakin efektif dan efisien sistem pengendalian internal yang dilakukan maka semakin baik pula usaha pencegahan kecurangan (*fraud*) (Armelia & Wahyuni, 2020). *Whistleblowing system* merupakan pengungkapan yang dilakukan berdasarkan kegiatan atau perilaku yang 44iker44l, tidak bermartabat yang melanggar ketentuan hukum baik di sektor publik atau swasta (Kristanto et al., 2020). *Whistleblowing* merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota yang masih aktif maupun tidak aktif yang melaporkan tentang perilaku pelanggaran, perilaku 44iker44l maupun tidak bermoral kepada pihak internal atau eksternal organisasi dan *whistleblowing system* akan memberi peringatan atau hukuman kepada individu yang melakukan kecurangan pada laporan keuangan (Asiah & Setyorini, 2017). *Whistleblowing system* yaitu pengungkapan informasi berdasarkan perilaku yang melanggar hukum atau penyalahgunaan tanggung jawab yang merugikan masyarakat dan dapat digunakan sebagai sarana pengawasan (Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 2019). Pengungkapan yang dilakukan harus didasarkan pada niat yang baik dan bukan sebagai penyampaian protes kepada seseorang terhadap tata cara organisasi atau fitnah (Islamiyah et al., 2020). Keberhasilan sistem pelaporan bisa dilihat dari jumlah kecurangan yang dapat diminimalisir dan kecepatan dalam penanganannya (Hertati, et, all, 2021; Inawati & Sabila, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah et al. (2020) dan Jayanti & Suardana (2019) menyatakan bahwa *whistle-blowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat efektivitas *whistleblowing* maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud* dan apabila tingkat efektivitas *whistleblowing* turun maka tingkat pencegahan *fraud* akan ikut turun (Dewi & Trisnarningsih, 2021).

Moralitas aparatur kalurahan merupakan nilai – nilai pribadi, kode etik antara baik dan buruk serta bisa membedakan pantas atau tidak pantas dilakukan. Terjadinya kecurangan akuntansi pada organisasi disebabkan oleh moralitas aparatur yang berada di organisasi tersebut karena moralitas saling berhubungan dengan kehendak individu untuk melakukan kecurangan akuntansi (Armelia & Wahyuni, 2020; Jayanti & Suardana, 2019). Organisasi memiliki pegawai yang bekerja sesuai bidangnya masing – masing dengan tingkat moralitas yang berbeda – beda dan mungkin berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang akan timbul (Njonjie et al., 2019). Moral dapat bermakna baik atau buruknya perilaku seseorang. Dalam kegiatan sehari – hari banyak individu maupun kelompok yang melanggar hukum demi kepentingan individu maupun kelompok dengan merugikan orang lain (Junia et al., 2016). Moralitas mampu mempengaruhi baik dan buruk sikap atau perilaku yang dilakukan individu (Laksmi & Sujana, 2019).

Kecurangan dapat diminimalisir dengan menanamkan moralitas pada manusia. Moral individu terlihat dari karakter dan pola pikir yang memuliakan kejujuran dan keadilan (Dewi et al., 2017). Individu yang tidak menghargai moralitas cenderung akan memutuskan sesuatu sesuai keinginannya sendiri dan tidak menghiraukan tanggung jawab, kewajiban, peraturan – peraturan serta hukum yang berlaku dan dipenuhi (Islamiyah et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti & Suardana (2019) dan Islamiyah et al. (2020) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat penalaran moral, individu akan melakukan kegiatan atau hal-hal sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan cenderung menghindari terjadinya *fraud* (Dewi et al., 2017).

Pada tahun 2019 telah dilakukan penahanan Lurah Banyurejo oleh Kejaksaan Negeri Sleman setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa di Kalurahan Banyurejo tahun 2015 – 2016. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat ada kerugian dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Banyurejo yang disebabkan oleh pengeluaran – pengeluaran yang tidak disertai dengan nota, melakukan pencairan atau pengelolaan dana desa tanpa pembukuan. Danarta, Lurah Banyurejo sering melakukan pencairan dana desa tanpa sepengetahuan Danarta. Berdasarkan perhitungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahap penyidikan diperkirakan kerugian

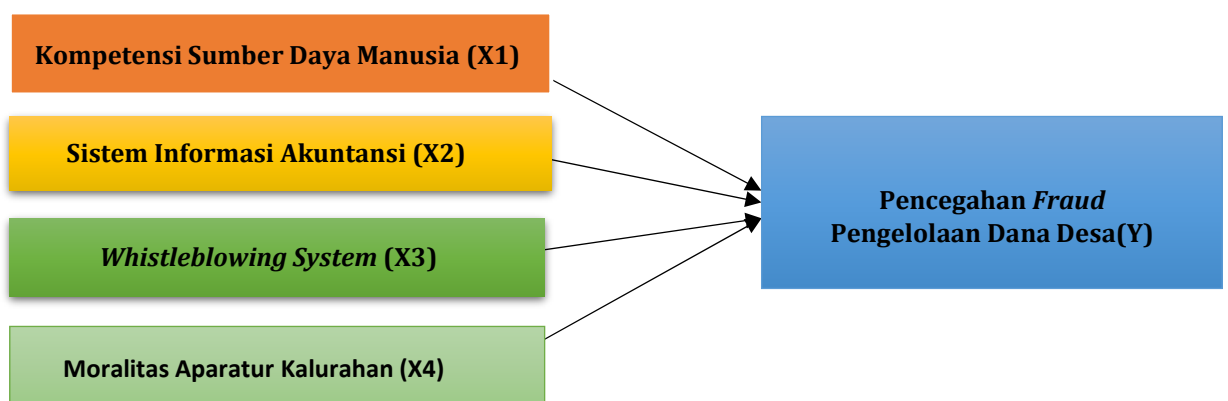
negara mencapai Rp 633.000.000 (BPK, 2019). KPK mencatat terdapat empat aspek pemicu korupsi di pengelolaan keuangan desa, yaitu: aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia (Laksmi & Sujana, 2019). Hasil dari Survei Fraud Indonesia (SFI) pada tahun 2019 kecurangandi Indonesia paling besar adalah tindakan penggelapan dana 64,4%, penyelewengan aset 28,9% dan *fraud* pada laporan keuangan 6,7% (Inawati & Sabila, 2021).

*Agency theory*, yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) merupakan teori yang menjelaskan bahwa hubungan kontraktual dapat tercipta disaat satu orang atau lebih (*principal*) menunjuk orang lain (*agent*) untuk melakukan pekerjaan jasa dan kemudian pihak *principal* memberikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengambilan keputusan. Teori keagenan (*Agency Theory*) mempunyai tujuan untuk menjelaskan jika pihak – pihak yang saling terhubung dalam keagenan dapat meminimalisir tidak akuratnya laporan keuangan yang disebabkan oleh informasi yang tidak simetris sehingga berdampak pada laporan realisasi anggaran yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa (Atmadja & Saputra, 2017). Pemerintahan kalurahan dalam menjalankan perintah dari pemerintah pusat atau daerah dalam mengelola keuangan desa yang baik harus memiliki aparatur yang mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, diimbangi dengan sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* yang baik, serta moralitas individu yang tinggi (Jayanti & Suardana, 2019).

Pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur kalurahan pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Laksmi & Sujana, 2019; Armelia & Wahyuni, 2020). Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor – faktor lain yang mempengaruhi upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: *whistleblowing system* karena dalam penelitian pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa untuk variabel

*whistleblowingsystem* masih jarang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparatur kalurahan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada lima Kapanewon di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa *whistle-blowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan karena dapat meminimalisir tindak terjadinya penyelewengan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa dengan keikutsertaan masyarakat dalam melaporkan tindak kecurangan yang dilakukan aparatur kalurahan serta dijamin kerahasiaan identitas pelapor dapat membantu pihak berwenang untuk mencegah tindakan penyelewengan sedari awal dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang tentang determinan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa selain terjadi di Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain yang mendapatkan dana untuk pembangunan desa dan juga masyarakat. Kabupaten Sleman mempunyai banyak desa yang mendapat kucuran dana yang meningkat setiap tahunnya sehingga diperlukan upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban aparat kalurahan. Sehingga banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.



**Gambar 1. Kerangka berpikir**

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* serta membagikan kuesioner secara langsung kepada responden dan diukur dengan skala *likert* 1 – 5, dimana nantinya data akan diolah dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 28.

## Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini menggunakan populasi pada seluruh Kalurahan yang berada di wilayah Sumatera Selatan yang terdiri dari tujuh belas kabupaten dengan total delapan puluh enam Kalurahan. Peneliti mengambil sampel pada empat puluh Kalurahan dengan pemilihan lima Kecamatan dari total dua ratus responden yang berada di Sumatera Selatan dengan kriteria: Sumatera Selatan yang masih memiliki angka kemiskinan lebih dari 11,95% tahun 2023 dari total jumlah penduduk di Sumatera Selatan dengan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan dari tahun ketahun, Kecamatan dengan lahan perairan dan pemukiman serta pertanian.

## Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat dihitung atau diukur secara langsung berupa informasi atau penjelasan yang ditunjukkan dengan berbentuk angka. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang secara langsung didapatkan dari sumber yang diteliti kemudian diberikan kepada peneliti untuk diolah menjadi data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner dengan memberikan pertanyaan untuk masing-masing variabel independen dan dependen kepada responden.

### **Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada 200 responden yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu: 1) Aparat kalurahan yang berada di wilayah Kabupaten Sumatera Selatan. 2) Aparat kalurahan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya: Lurah, Carik, Danarta, dan BPK (Badan Permusyawaratan Kalurahan) berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. 3) Aparat kalurahan di tujuh belas kabupaten dengan total delapan puluh enam Kalurahan 4) Aparat kalurahan dengan tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas(SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan(SMK). 5) Aparat kalurahan dengan masa jabatan minimal kurang dari 1 tahun. Perhitungan jawaban responden pada kuesioner dihitung menggunakan skala *likert* 1 sampai 5.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengolah data hasil dari pengumpulan penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan kemudian diolah dengan menggunakan *Microsoft excel 2019* dan aplikasi *software SPSS 25.0 for windows* dengan tingkat signifikan (*level of significance*) yang digunakan adalah 0,05 (5%). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan (uji), yaitu: uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik pengujian data pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan pengujian dan analisis terhadap hipotesis. Pengujian ini menggunakan beberapa alat uji, yaitu: uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji kelayakan model (Uji F), uji hipotesis (Uji t). Hasil dari analisis linier berganda pada penelitian ini akan menguji seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem informasi akuntansi, *whistleblowing system*, dan moralitas aparat Kalurahan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Persamaan regresi linier berganda biasanya dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut:

$$f = \alpha + \beta_1 Y_1 + \beta_2 Y_2 + \beta_3 Y_3 + \beta_4 Y_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa

$\alpha$	=Konstanta
X1	=Kompetensi SDM
X2	=Sistem informasi akuntansi
X3	= <i>Whistleblowing system</i>
X4	=Moralitas aparaturn Kalurahan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	=Koefisien regresi
$\epsilon$	=Standar error

### Variabel dan Pengukuran Variabel

*Fraud* merupakan tindakan menyalah-gunakan wewenang atau jabatan yang terjadi di organisasi publik dengan tujuan mencari keuntungan pribadi, sehingga diperlukantindakan pencegahan agar tidak terjadi *frauddalam* mengelola keuangan desa (Islamiyah et al., 2020). Pengukuran pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa diukur menggunakan 4 indikator (Laksmi & Sujana,2019), yaitu: penetapan kebijakan *anti-fraud*,prosedur, teknik pengendalian, kepekaanterhadap *fraud*.

Kompetensi sumber daya manusia pada aparaturn kalurahan merupakan kemampuan aparat kalurahan dalam menjalankan wewenangnya dengan baik dan patuh pada hukum yang berlaku agar pengelolaan keuangan desa bisa terhindar dari *fraud* (Armelia & Wahyuni, 2020). Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan 3 indikator (Laksmi & Sujana,2019), yaitu: pengetahuan, keterampilan,sikap kerja/Perilaku.

Sistem pengendalian internal merupakanserangkaian langkah-langkah atau tahapan-tahapan dimulai dari mengumpulkan data, mencatat, menggolongkan, meringkas transaksi, sampai dengan pelaporankeuangan sebagai bentuk pertanggung-jawaban baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer(Dennyingrat & Suputra, 2018). Sistem Pengendalian Internal diukur dengan menggunakan 5 indikator (Laksmi & Sujana,2019), yaitu: lingkungan pengendalian,penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal

*Whistleblowing* merupakan pengutaraan informasi yang berasal dari dalam maupun luar organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan sikap melanggar hukum atau aturan yang berlaku di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan (Anandya & Werastuti, 2020). *Whistleblowing system* diukur dengan menggunakan 3 indikator (Asiah & Setyorini, 2017), yaitu: aspek struktural, aspek operasional, aspek perawatan.

Moralitas merupakan akhlak yang berasal dari dalam diri manusia yang melakukan penyimpangan dengan menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan suatu kecurangan (Anandya & Werastuti, 2020). Moralitas diukur dengan menggunakan 3 indikator (Laksmi & Sujana, 2019), yaitu: perbuatan, sikap, akhlak individu.

## Hasil Dan Pembahasan

### Tingkat Pengembalian Kuesioner

Berdasarkan kuesioner yang sudah dikumpulkan dari responden, maka diperoleh tingkat pengembalian kuesioner. Berikut rincian tingkat pengembalian kuesioner yang disajikan dalam tabel:

Tabel 1. Jumlah Kuesioner Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	300	100%
2	Kuesioner yang kembali	230	93,33%
3	Kuesioner yang tidak kembali	20	6,67%
4	Kuesioner yang dapat diolah	200	87,50%
5	Kuesioner yang tidak dapat diolah	10	5,83%

Sumber: data primer yang diolah (2023)

### Karakteristik responden

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dari responden, maka diperoleh tentang karakteristik responden yang terdiri dari: jenis kelamin, usia, jabatan, masa jabatan, dan pendidikan. Berikut rincian karakteristik responden yang disajikan dalam table.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Perempuan	26	24,76%
Laki – Laki	79	75,24%
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>

Usia	21 – 30 tahun	11	10,48%
	31 – 40 tahun	31	29,52%
	41 – 50 tahun	29	27,62%
	>50 tahun	34	32,38%
	<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>
Jabatan	Lurah	26	24,76%
	Carik	30	28,57%
	Danarta	25	23,81%
	Lain – Lain	24	22,86%
	<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>
Masa Jabatan	< 1 tahun	11	10,48%
	1 – 5 tahun	55	52,38%
	6 – 10 tahun	16	15,24%
	>10 tahun	23	21,90%
	<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>
Pendidikan	SMA/SMK	24	22,86%
	D3/S1	75	71,43%
	S2	6	5,71%
	Lain – Lain	0	0
	<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100%</b>

Sumber: data primer yang diolah (2023)

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya instrumen dalam kuesioner. Kuesioner valid apabila tingkat signifikansi dibawah 0,05 atau *p value* < 0,05. Berikut contoh hasil uji validitas pada variabel kompetensi sumber daya manusia yang disajikan dalam tabel:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya (SDM)

Variabel (X1)	Pearson Correlation	P Value	Keterangan
Pernyataan 1	0,664**	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,818**	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,824**	0,00	Valid
Pernyataan 4	0,651**	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,629**	0,00	Valid
Pernyataan 6	0,753**	0,00	Valid

Pernyataan 7	0,646**	0,00	Valid
Pernyataan 8	0,748**	0,00	Valid
Pernyataan 9	0,733**	0,00	Valid
Pernyataan 10	0,786**	0,00	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2023)

Hasil uji validitas dari 10 (sepuluh) item pernyataan pada variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) menunjukkan bahwa  $pvalue < 0,05$  yang berarti pernyataan pada seluruh variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) dinyatakan valid.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Akuntansi**

Variabel (X2)	Pearson Correlation	P Value	Keterangan
Pernyataan 1	0,643**	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,707**	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,705**	0,00	Valid
Pernyataan 4	0,681**	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,693**	0,00	Valid
Pernyataan 6	0,638**	0,00	Valid
Pernyataan 7	0,721**	0,00	Valid
Pernyataan 8	0,566**	0,00	Valid
Pernyataan 9	0,638**	0,00	Valid
Pernyataan 10	0,663**	0,00	Valid
Pernyataan 11	0,619**	0,00	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2023)

Hasil uji validitas dari 11 (sebelas) item pernyataan pada variabel sistem informasi akuntansi menunjukkan  $p value < 0,05$  maka pernyataan pada seluruh variabel sistem pengendalian internal dinyatakan valid.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Whistleblowing System**

Variabel (X3)	Pearson Correlation	P Value	Keterangan
Pernyataan 1	0,486**	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,465**	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,487**	0,00	Valid
Pernyataan 4	0,577**	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,614**	0,00	Valid
Pernyataan 6	0,617**	0,00	Valid
Pernyataan 7	0,644**	0,00	Valid
Pernyataan 8	0,573**	0,00	Valid
Pernyataan 9	0,630**	0,00	Valid
Pernyataan 10	0,605**	0,00	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2023)

Hasil uji validitas dari 10 (sepuluh) item pernyataan pada variabel *whistleblowingsystem* menunjukkan bahwa  $p\ value < 0,05$  yang berarti pernyataan pada seluruh variable *whistleblowing system* dinyatakan valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Moralitas Aparatur Kalurahan

Variabel (X4)	Pearson Correlation	P Value	Keterangan
Pernyataan 1	0,854**	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,882**	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,891**	0,00	Valid
Pernyataan 4	0,627**	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,478**	0,00	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2023)

Hasil uji validitas dari 5 (lima) item pernyataan pada variabel moralitas aparaturn Kalurahan menunjukkan  $p\ value < 0,05$  makapernyataan pada seluruh variabel moralitas aparaturn Kalurahan dinyatakan valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Variabel (Y)	Pearson Correlation	P Value	Keterangan
Pernyataan 1	0,602**	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,679**	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,594**	0,00	Valid
Pernyataan 4	0,587**	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,626**	0,00	Valid
Pernyataan 6	0,599**	0,00	Valid
Pernyataan 7	0,530**	0,00	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2023)

Hasil uji validitas dari 7 (tujuh) item pernyataan pada variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan  $p\ value < 0,05$  makapernyataan pada seluruh variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dinyatakan valid.

### Uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner dan kuesioner bisa dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* >0,70. Berikut hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel:

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya (SDM) (X1)	0,896	Reliable
Sistem Informasi akuntansi (X2)	0,867	Reliable
Whistleblowing System (X3)	0,735	Reliable
Moralitas Aparatur Kalurahan (X4)	0,817	Reliable
Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,708	Reliable

Sumber: data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas tabel 8 diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan - pernyataan yang mengukur variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem Informasi akuntansi, *whistleblowing system*, moralitas aparaturne Kalurahan, dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa adalah *reliable* (dapat dipercaya) karena telah memenuhi syarat minimal yang telah ditentukan.

### Pengujian Hipotesis

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	- 10,208	2,073	-	4,923	0,000
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X1)	0,221	0,045	0,284	4,872	0,000
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,300	0,045	0,375	6,591	0,000
Whistleblowing System (X3)	0,251	0,044	0,295	5,643	0,000
Moralitas Aparatur kalurahan (X4)	0,273	0,037	0,360	7,325	0,000

<b>Adjusted R Square</b>	= 0,776
<b>F hitung</b>	= 91,194
<b>Signifikansi</b>	= 0,000

Sumber: data primer yang diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 9 menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, *whistleblowing system*, dan moralitas aparatur kalurahan mempunyai tingkat signifikansi  $<0,05$  dan memiliki nilai koefisien t bertanda positif (+). Hal ini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparatur kalurahan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil pengujian kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem informasi akuntansi, *whistleblowing system*, moralitas aparatur Kalurahan, dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa memiliki nilai *Adjusted R square* sebesar 0,776 yang berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 77,6% sedangkan 22,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H1 yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Laksmi & Sujana (2019) yang menyebutkan bahwa kompetensi sumber sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Kapasitas diri yang dimiliki oleh aparat kalurahan dapat merubah sikap aparatur untuk lebih waspada dalam melakukan pekerjaannya karena aparatur kalurahan mengerti akan sanksi yang dikenakan apabila melakukan kecurangan (Inawati & Sabila, 2021).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H2 yaitu sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Atmadja & Saputra (2017) yang menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang sama dilakukan oleh Dewi et al. (2017) yang menyebutkan bahwa pengendalian internal kas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hertati, L., & Safkaur, (2021) semakin baik sistem informasi akuntansi maka akan semakin baik pula upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, sebaliknya semakin rendah sistem informasi akuntansi maka upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa juga akan semakin rendah (Armelia & Wahyuni, 2020).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H3 yaitu *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Islamiyah et al. (2020) yang menyebutkan bahwa *whistle-blowing* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Jayanti & Suardana (2019) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pelaporan yang dilaksanakan secara efektif bisa meminimalisir kecurangan yang akan terjadi karena sistem pelaporan (*whistleblowing system*) secara tidak langsung merupakan upaya pengawasan yang dilakukan instansi (Inawati & Sabila, 2021; Anandya & Werastuti, 2020).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H4 yaitu moralitas aparatur kalurahan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Laksmi & Sujana (2019) yang menyebutkan bahwa moralitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Islamiyah et al. (2020) yang menyatakan bahwa moralitas memiliki pengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pada suatu organisasi tingkat moral tata laksana dalam organisasi tersebut mempengaruhi keinginan dalam melakukan penyelewengan yang akan muncul pada organisasi tersebut karena suatu instansi mempunyai staf – staf yang melakukan pekerjaannya

dengan tanggungjawab tugas masing - masing sehingga tingkat moral seseorang akan berpengaruh pada sikap dan perilakunya (Njonjie et al., 2019; Dennyningrat & Suputra, 2018).

## Simpulan

Bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas akan memahami tugas dan kewajibannya dengan baik untuk mengelola keuangan serta membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung-jawaban, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, semakin baik sistem pengendalian yang ada pada organisasi tersebut maka untuk mencapai upaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam organisasi tersebut juga semakin baik, *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini bahwa *whistleblowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran yang dilaksanakan pihak internal maupun eksternal yang mengetahui tindakan kecurangan yang dilakukan oleh aparatur kalurahan dalam mengelola keuangan desa akan membantu pihak yang berwenang dalam memeriksa dan menyelidiki tindakan kecurangan aparatur kalurahan tersebut, moralitas aparatur kalurahan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini bahwa aparatur yang memiliki tingkat moralitas yang baik akan memikirkan sanksi yang akan didapatkan jika melakukan kecurangan dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan atau tugas yang telah diberikan.

## Daftar Pustaka

Anandya, K. C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh *whistleblowing system*, budaya organisasi dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada PT. Pelabuhan

- Indonesia III( Persero ) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 185–194. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/25933>
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal dan moral sensitivity terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61–70. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Asiah, N., & Setyorini, D. (2017). Pengaruh bystander effect dan whistleblowing terhadap kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Nominal*, 6(1), 109–123. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/14336>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), (2016).
- Astuti, N. K. A. T. A., Sujana, E., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh moralitas individu, ketaatan aturan akuntansi, dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14748>
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (2019). Cressey,
- Dewi, F. M., & Trisnaningsih, S. (2021). Pengaruh whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan BOS dengan variabel intervening komponen struktur pengendalian internal. *Jurnal MEBIS (Manajemen Dan Bisnis)*, 6(1), 62–73. <https://doi.org/10.33005/mebis.v6i1.197>
- Dewi, P. F. K., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh moralitas, integritas, komitmen organisasi, dan pengendalian internal kas terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Studi pada desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2).
- Gantino, R., Hertati, L., & Ilyas, M. (2021). Taxpayer Compliance Model Moderated by Socialization Taxation SMEs in Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 11(2), 2250-3153.
- Handi, A., Raharjo, I. B., & Wahidahwati. (2021). Determinan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 1–10.
- Hertati, L. (2023). Bab 3 Fungsi Sistem Akuntansi. *Sistem Akuntansi*, 30.
- Hertati, L., & Safkaur, O. (2021). The Influence Of Human Resource Competencies To Improve The Internal Control System For Patients In The Covid-19 Era Hospital. *International Journal Economic And Business Applied*, 2(1), 57-71.
- Hertati, L. (2021). Peran Anggaran Informasi Akuntansi Terhadap Pusat Pertanggung jawaban Biaya. *@ is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 6(2), 121-135.

- Hertati, Lesi, et al. 2020 "The effects of economic crisis on business finance." *International Journal of Economics and Financial Issues* 10.3 (2020): 236.
- Hasibuan, R., Ilyas, M., Hertati, L., Saputra, E., Lestari, B. A. H., Kustina, K. T., & Ristiyana, R. (2023). *Sistem Akuntansi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Hastutik, S., Agus Yulistiyono, S. E., Nurofik, A., Lesi Hertati, & Darmaesti, S. E. (2022). *Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Lesi Hertati, S. E. (2022). Bab V Akuntansi Manajemen Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, 65.
- Arifin, M. S., Rachmat, Z., Laratmase, P., Muniarty, P., Sudirjo, F., Ilyas, M., ... & Hartati, L. (2023). *Sistem Informasi Manajemen*. Global Eksekutif Teknologi.
- Hertati, Lesi, et al. "Peran Akuntansi Aktiva Tetap, Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Akibat Covid-19." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1.2 (2021): 182-200.
- Lesi Hertati, S. E. "Bab V Akuntansi Manajemen Sektor Publik." *Akuntansi Sektor Publik* (2022): 65.
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan fraud : pengaruh whistleblowing system, government governance dan kompetensi aparatur pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731–745.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaannya desa di Kecamatan Wajak (Studi empiris pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Pato. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8(1), 1–13.
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas, whistleblowing dan SPI terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117–1131.
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa serta komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>
- Junia, N., Rasuli, M., & Diyanto, V. (2016). Pengaruh moralitas aparat, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi

- empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, 3(1), 1623–1637.
- Kristanto, S. B., Angeline, A., & Subagyo, S. (2020). Survei kecurangan akademik pada mahasiswa program studi akuntansi. *Perspektif Akuntansi*, 3(3), 179–196.
- Njonjie, P., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh kompetensi , sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 10(2), 79–88.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016.
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). Peran komitmen, kompetensi, dan spiritualitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2155–2182. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Simaremare, E., Handayani, C., Basri, H., Tambunan, A., & Umar, H. (2019, October). Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Pendeteksian Fraudulent Financial Statement Dengan Kebijakan Anti Fraud Sebagai Variable Moderasi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2018. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (pp. 2-10).
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. (2018). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1526-1531.
- Umar, 2011 "Government Financial Management Strategy for Preventing Corruption in Indonesia," *South East Asian J. Manag.*, vol. 5, no. 2, pp. 19–36, 2011.
- Umar, H. (2012). Pengawasan untuk pemberantasan korupsi. *Jurnal Akuntansi dan auditing*, 8(2), 109-122.
- Umar, H., Erlina, E., & Fauziah, A. (2019). Audit quality determinants and the relation of fraud detection. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(3).
- Umar, H., Partahi, D., & Purba, R. B. (2020). Fraud diamond analysis in detecting fraudulent financial report. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 6638-6646.
- Umar, H., & Purba, R. B. (2019). *Audit Forensik Lawan Korupsi*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Umar, D., & Nurfadillah, I. A. (2016). Pengaruh efektifitas pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi pada PT Inka Mutiara Mas. *JAWARA : Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 4(1), 40–53.

- Utami, W. B., & Ibrahim, K. W. (2019). Pengaruh pembangunan desa dan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa terhadap akuntabilitas publik pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 36–42.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020> Jurnal
- Wulandari, Y., & Widodo, S. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud: studi pada pemerintah desa di kabupaten Bantul. *Journal of Business and Information Systems*, 2(1), 12–20. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.34>
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 166–175. <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/3779/3359>
- Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 68–76.

